

MASYARAKAT HINDU DALAM POLITIK NKRI MENUJU MASYARAKAT SIPIL

Oleh I Nengah Duija
Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

ABSTRACT

Peoples Hinduism is one component of the whole Indonesian nation from a state (nation state). Therefore, the position and its position in the Republic of Indonesia is actually the same, but in the context of national politics often a question of what is by Antonio Gramsci as a political regional hegemony. Hegemony is happening is the issue of access to power, economic, social, cultural, religious, and even become a "majority versus minority". They are the social and political construction that is too dominant countries penetrated the realm of privacy of citizens countries.

Based on that idea, then in recent decades appears "penggugatan" against the domination of the country by the growth of the so-called civil society (civil society). The growth of civil society is determined by the movement of the middle class (middle class), the emergence of a pro-people NGOs, the organic intellectual movement (to borrow a phrase Gramsci) and other social movements. In this regard, the Hindu community has a function in foster civic values ??able to forge the formation of civil society itself. These values ??are the basic power (spirit) the formation of civil society in Indonesia.

Keywords: *Hindu Society, Politics, and Civil Society*

I. PENDAHULUAN

Pada awal dua dasawarsa terakhir abad kedua puluh, kita menemukan diri kita berada dalam suatu krisis yang serius yaitu suatu krisis kompleks dan multidimensional yang segiseginya menyentuh setiap aspek kehidupan kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik. Krisis ini merupakan krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral dan spiritual; yakni suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia (Capra, 1997:3). Dengan demikian berarti secara sosiologis masyarakat kita tengah mengalami transformasi sosial yang telah menyentuh pada bagian dalam diri kehidupan umat manusia yakni spritualitas, moralitas dan intelektualitas. Kita menyadari

bahwa perubahan adalah konsekuensi dari dinamika sebuah kehidupan masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan tidak pernah berada dalam keadaan statis, tetapi selalu berada dalam proses yang dinamis. Hal ini disebabkan oleh "dalam masyarakat selalu bekerja dua macam kekuatan" yaitu kekuatan yang ingin menerima perubahan (kaum progresif) dan kekuatan yang cenderung menolak perubahan (kaum konservatif). Dua kekuatan inilah yang merupakan dinamika sosial masyarakat yang selalu tarik-menarik (Kusumohamidjojo, 1999:51).

Dalam perubahan masyarakat terdapat masa-masa transisi, yang akan membawa masyarakat yang bersangkutan menuju dua arah yakni apakah menuju kemajuan ataukah

sebaliknya sebuah kehancuran. Ketidaksamaan persepsi dalam penyelenggaraan negara akan menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari apa yang kita sepakati bersama sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara seperti Pancasila dan UUD'45 (Bagus, 1998:2). Berdasarkan hal tersebut masyarakat Indonesia cenderung untuk dapat dipandang sebagai suatu "masyarakat besar yang belum selesai", mungkin ini yang akhirnya memunculkan pernyataan Bekker yang dikutip juga oleh Ohmae "*Born between two worlds, the one dead, the other not yet alive*" artinya kita sedang berkelana di antara dua dunia: dunia yang satu sudah mati, selagi dunia yang lain belum bahkan menghadapi resiko untuk tidak mampu lahir (Kusumohamidjojo, 2000: 3-5).

Wacana-wacana di atas, mencuat setelah era reformasi mulai digulirkan beberapa tahun yang lalu. Konsekuensi dari era reformasi itu ada dasarnya penggugatan terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gugatan-gugatan kedaerahan ini sebagai akibat dari keberhasilan Orde Baru dalam bidang ekonomi, perwujudan administrasi kenegaraan dan politik luar negeri, namun tidak dibarengi oleh keberhasilan dalam pembangunan kehidupan demokrasi (Hikam, 1996:X). Kematian demokrasi di masa Orba, berimplikasi pada ketidakmampuan anggota masyarakat untuk mengembangkan mengekspresikan pemikiran-pemikiran mereka sesuai dengan ciri khas etnis, agama, bahasa, dan sebagainya. Padahal, menurut John Lockce, manusia dilahirkan, sebagai mana telah dibuktikan dengan hak atas kebebasan sempurna dan hak untuk menikmati secara tak terbatas semua hak-hak dan previlese hukum kodrat, bersama-sama dengan setiap orang lain dengan kelompok orang mana saja di dunia ini dan pada hakekatnya mempunyai wewenang bukan untuk menyelamatkan harta benda, yaitu nyawanya, kebebasan dan harta miliknya terhadap kerugian dan usaha-usaha orang lain,

tetapi juga mempunyai wewenang untuk menentukan dan menghukum pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap orang lain (Lubis, 1994:76).

Masyarakat yang sentralistik yang segala aspek kehidupan, dimana terdapat Hirarki politik, ekonomi, idiologi tunggal yang tak mentoreril saingan dan pisi tunggal yang bukan saja yang mendefinisikan kebenaran, melainkan juga menentukan kebenaran perilaku individu, hal ini menyebabkan seluruh masyarakat mendekati kondisi tratomisasi dan kemudian perbedaan pendapat menjadi tanda pemberontakan (Gellner,1995:1). Di sinilah masyarakat tidak berdaya untuk mengimbangi kekuatan negara yang bersifat otoriter, padahal "pemberdayaan masyarakat" tertuang di dalam konsep *Civil Society*. Masalah pemberdayaan masyarakat dalam konteks *Civil Society* sangat ditekankan karena dalam *Civil Society* wilayah kehidupan social yang terletak diantara "negara dan komunitas local" dimana terhimpun kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keberanekaragaman serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerinah (Alam, 1999:1). Meskipun diakui bahwa pendekatan negara dapat menjelaskan realitas politik Indonesia, tetapi disisi lain memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, ia terlalu menekankan peranan negara seolah-olah sebagai aktor yang paling menentukan dalam kehidupan politik. Kedua, cenderung mereduksi proses politik dengan melihatnya sebagai proses kelembagaan yang bersifat formal legalistik. Ketiga, terkesan lebih melihat fenomena politik sebagai realitas pergulatan kepentingan di kalangan elit dalam upaya mempengaruhi merebut atau mempertahankan kekuasaan ditingkat negara. Keempat, karena ia lebih meletakkan perhatian pada artikulasi dan aktivitas kelembagaan negara maka aktivitas dinamika yang terjadi di lepel masyarakat, di luar negara sering kali amat diabaikan dengan demikian negara sangat mendominasi segala aspek kehidupan

masyarakat, maka dengan adanya *konsep civil society* dapat diartikan merupakan sebuah arus balik (Culla, 1999:12).

Arus balik ini adalah bentuk reaksi positif untuk mengkristisi fenomena-fenomena yang secara tidak proporsional telah memarginalkan, hak hidup masyarakat, hak budaya, hak bahasa, hak agama dan sebagainya. Orang kini semakin sadar bahwa peran serta tradisi dan ajaran agama makin penting bila proses modernisasi ingin berlanjut dan mengurangi kecendrungan eksploitatif dan destruktifnya. Agama dan pemimpin agama semakin diharuskan melibatkan diri dalam persoalan yang ditimbulkan oleh modernisasi, termasuk maraknya kekerasan dalam masyarakat (Hikam, 1999:52). Politik global dipergantian millenium ditandai oleh dua peristiwa yang berjangkauan jauh. Peristiwa pertama adalah penyebaran ide-ide demokrasi untuk masyarakat dan kebudayaan yang berbeda diseluruh dunia dan peristiwa kedua adalah penampakan kembali isu-isu etnik dan agama dalam urusan-urusan publik, apakah itu dengan nasionalisme Hindu di India, Islam, dan kewarganegaraan di Prancis, perang kebudayaan di Amerika Serikat atau gerakan-gerakan Islam di dunia Muslim, ini membuktikan bahwa perkiraan kaum modernis terkemuka perihal kematian agama dan etnisitas adalah sangat premature (Hafner, 2000:15). Peran agama di era Globalisasi menjadi lebih kentara, manakala konsep teologis telah merambah realitas sosial yakni sampai pada tataran aksi (tindakan sosial). Di sini agama tidak hanya dipahami dalam kaitannya dengan perilaku individu terhadap Sang Maha Pencipta, tetapi bagaimana konsep teologi tersebut mampu mengulangi persoalan-persoalan sosial kemanusiaan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Relevansi *Civil Society* akhir-akhir ini menjadi semakin dirasakan pentingnya mengingat semakin krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seperti diketahui krisis ekonomi dan politik sekarang ini yang tampaknya cenderung semakin memburuk, telah menempatkan Indonesia ke dalam situasi yang amat kritis dan rentan terhadap disintegrasi. Konflik kepentingan antar berbagai kelompok masyarakat semakin terbuka, kemampuan dan kredibilitas pemerintah sangat lemah untuk segera mencari jalan keluar dari kresis ini. Situasi menegaskan perlunya pemberdayaan *Civil Society* sebagai suatu upaya untuk mencegah ancaman-acaman disintegrasi itu menjadi realitas (Dwiyanto, 1999 :10). Gagasan *Civil society* yang diterjemahkan menjadi masyarakat madani sesungguhnya baru belakangan populer sekitar awal tahun 90-an di Indonesia, dan karena itu barangkali juga masih berbau “asing” bagi sebagian masyarakat kita. Konsep ini pada awalnya sebenarnya mulai berkembang di Barat, memiliki akar sejarah awal dalam peradaban masyarakat Barat, dan terakhir setelah sekian lama seolah-olah terlupakan dalam perdebatan wacana ilmu social modern, kemudian mengalami revitalisasi terutama ketika Eropa Timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80-an hingga awal 90-an. Selanjutnya, wacana ini oleh banyak bangsa dan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia ikut dikaji, dikembangkan dan dieliminasi, sebagaimana realitas empiris yang dihadapi (Culla, 1999:3). Konsep *civil society* baru menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat sekitar pertengahan tahun 1990, ketika pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara sedang maju dengan pesatnya. Perbincangan itu tumbuh ke permukaan antara lain, karena negara-negara yang sedang mengalami kemajuan ekonomi itu, relatif tidak tercipta peluang yang berarti bagi

tumbuhnya peranan publik dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktek kehidupan, cengkraman negara begitu kuatnya mewarnai dinamika kehidupan publik (Sairin, 1999:88).

Pada mulanya masyarakat sipil (*civil society*) adalah diskursus pemikiran krisis radikal sebagai media untuk menjelaskan dan dipahami dalam konotasi sebagai gerakan rakyat untuk melakukan resistensi terhadap negara yang pada konteks zamannya, negara dianalisis justru menjadi alat kapitalisme. Sejak itu, *civil society* selalu merupakan diskursus pemikiran kritis terhadap Kapitalisme. Namun, sejak tahun 90-an terjadi pergeseran diskursus terhadap masyarakat sipil, meskipun masih memiliki dimensi sebagai bangkitnya resistensi masyarakat terhadap negara dalam rangka demokratisasi, namun dimensi kritis terhadap kapitalisme tidak kelihatan lagi. Pada saat bersamaan muncul juga gerakan resistensi masyarakat sipil yakni masyarakat adat untuk menuntut hak-hak mereka terhadap sumber alami dan hak berbudaya yang jika dikaji lebih dalam justru datang dari paham pluralistik budaya yang berakar pada pemikiran posmodernisme (Fakih, 1999:3-4). Kalau dilacak dari akar sejarah gagasan masyarakat madani telah berkembang zaman Yunani Kuno, kemudian berpengaruh pada tradisi pemikiran Romawi Kuno, abad pertengahan sampai pada pemikiran ilmu social kritis abad ke 19 seperti yang dikemukakan oleh Gramsci dengan konsep hegemoninya (baca: Culla-1999:46-50). Masyarakat madani adalah istilah ungkapan yang dilontarkan oleh Dato Anwar Ibrahim pada sebuah Simposium Nasional Dalam rangka Forum Ilmiah Festival Istiqlal tahun 1995 (Gellner, 1995:6). Konsep inilah yang dikembangkan oleh Emil Salim dan Nucrolish Majid sebagai diskursus pemberdayaan masyarakat di Indonesia sekitar tahun 90-an.

Civil society adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara, meskipun tidak menghalangi negara dari

pemenuhan perannya sebagai penjaga perdamaian dan sebagai wasit dari berbagai kepentingan besar, namun tetap dapat menghalangi negara mendominasi dan mengatomisasi masyarakat (Gellner, 1995 :6). Civil society adalah arena tempat beradanya gerakan-gerakan social (seperti persatuan atas dasar kekerabatan, perhimpunan wanita, kelompok-kelompok agama, dan organisasi cendekiawan) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dari berbagai golongan dan profesi (seperti perhimpunan Sarjana Hukum, Persatuan wartawan, serikat buruh, asosiasi pengusaha dan sebagainya) yang mencoba membentuk diri mereka dalam suatu keteraturan supaya mereka dapat menyatakan dirinya dan menyalurkan kepentingan-kepentingan (Sagian, 1995:126).

Civil society dapat pula didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma hukum yang diakui oleh warganya (Hikam, 1996:3). Di Indonesia masyarakat sipil tampak pada grup-grup sosial yang kegiatannya atau aktivitasnya dimaksudkan untuk mencegah negara menguasai masyarakat. Untuk melihat aktivitas tersebut menurut tujuan, cara, ukuran dan batasannya, aktivitas sosial yang membentuk masyarakat sipil dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 1) ketahanan simbolik artinya ketahanan meliputi berbagai tindakan tak langsung melawan pemerintah yang otoritarian, 2) ketahanan praktis atau langsung adalah aktifitas yang menyuarkan kepentingan social dan tuntutan berbagai tantangan langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu, 3) ketahanan praktis simbolis suatu kombinasi dari butir 1 dan 2 (Hadiwinata, 1999:11-14).

2.2 Civil Society Dalam Masyarakat Multikultural

Struktur masyarakat Indonesia secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat-istiadat dan perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal ditandai dengan adanya pelapisan sosial yakni lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 1995:28). Oleh karena itu masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar bersifat majemuk dan jamak, tetapi juga sungguh rumit serumit jalinan suatu labirin. Dalam hubungan dengan masyarakat yang sedemikian kompleks, sering ada godaan untuk memperkuat posisi negara (sebagaimana yang biasanya diwakili oleh pemerintah) untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan sentripetal dan menjaga kohesi masyarakat (Kusumohamidjojo, 2000:149).

Untuk itu pengembangan masyarakat madani dalam kondisi masyarakat yang multietnis, multikultural, multiagama dan sebagainya memerlukan kerja keras untuk sampai pada penerapan konsep *civil society* itu. Tantangan sosial budaya yang cukup berat adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas itu tidak hanya berkaitan dengan budaya (*multicultural*), tetapi juga dimensi social, politik dan ekonomi masyarakat. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka selama 53 tahun, pluralitas masyarakat itu kurang dimanfaatkan sebagai potensi yang dapat didinamiskan untuk memacu pembangunan, namun justru kebijakan politik pembangunan selama ini adalah keanekaragaman diarahkan pada bentuk uniformitas (Sairin, 1999:93). Untuk tumbuhnya *civil society* sudah semestinya diberikan kebebasan kepada seluruh anggota masyarakat untuk turut serta menyumbangkan atau mengekspresikan apa yang menjadi ide-ide atau gagasannya sesuai dengan konsep *multikulturalisme* (Qodir, 1999:160).

Sesungguhnya tanpa keanekaragaman, demokrasi nyaris sama dengan diktator massa (Craig, 1999 :127).

Seperti pandangan modernis sekuler peramalan akan kematian etnis dan agama dalam kontek masyarakat sipil, ternyata meleset, namun sebaliknya gerakan-gerakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat lebih banyak bercorak keagamaan. Hal ini disebabkan oleh agama-agama diminta agar semakin mempublik yaitu perduli terhadap persoalan-persoalan dasar seperti kemiskinan, kebodohan dan kekerasan yang dirasakan oleh semua anggota masyarakat tanpa memandang asal-usul. Dalam rangka untuk mempublik itulah agama-agama tidak bisa lain kecuali terlibat sepenuhnya dalam wacana tentang HAM, demokratisasi, perlindungan lingkungan, masalah gender dan sebagainya (Hikam, 1999:52). Organisasi keagamaan di Indonesia, ketika berinteraksi, berusaha untuk menengok kepada doktrin-doktrin mereka sendiri, karena mereka ingin memberikan konteks budaya dalam kegiatan-kegiatan mereka. Karena itulah karena pada masa-masa akhir orde baru, nampak sekali kegiatan wacana intelektual yang bersifat teologis (Rahardjo, 1999:XXI).

Membangun moralitas politik dalam konteks negara seperti Indonesia dibutuhkan sumbangan dari sisi keagamaan. Model-model ketatanegaraan sudah banyak di gagas selama ini. Sementara itu tidak bisa disangkal bahwa banyak bangunan dasar masyarakat Indonesia masih bertumpu pada agama dan nilai-nilai kehidupan agama. Namun, agaknya selama ini agama-agama di Indonesia masih belum banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran moral dalam politik, gejala yang nampak lebih banyak adalah agama-agama mengelompok dalam berbagai partai politik yang eksklusif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam bidang moral masih banyak dikuasai oleh moral para penguasa politik, dan agama hanya sekedar

memberi legitimasi saja terhadap kiprah elit pemerintah (Sumartana, 1999:285).

2.3 Agama Hindu Menuju Konsep *Civil Society*

Agama Hindu yang memisahkan realitas politik dengan realitas agama, sebagai salah satu faktor lambannya umat Hindu dalam menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan dalam dimensi sosial kemasyarakatan. Padahal, agama Hindu memiliki banyak referensi yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan politik sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu konsep seperti itu adalah konsep Niti yang dapat diartikan tata cara memimpin yang benar atau tepat, politik, kebijaksanaan politik, kebijaksanaan duniawi (Zoetmulder, 1982:1199). Dengan demikian, pada prinsipnya Hindu mempunyai konsep politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya konsep dharma negara juga merupakan pengejawantahan dari konsep kehidupan umat Hindu dalam hubungannya dengan negara. Artinya, dalam politik keagamaan dalam suatu negara perlu diperhatikan Vivekananda “ Jika ada orang yang berharap behawa kerukunan suatu agama bias tercapai melalui kemenangan dari suatu ajaran agama dan penghancuran agama lainnya, maka kepadanya saya ingin berkata, Saudaraku, itu hanyalah impian” (Dalam Bagus,1995:74). Ini perlu disikapi oleh karena gejala yang muncul akhir-akhir ini dalam kancah politik nasional kita adalah “penonjolan” aspek teologis dalam mencapai sebuah kemenangan mayoritas.

Hindu dalam wacana demokratisasi telah mengembangkan *konsep tat twan asi (universalisme humanis)*, seungguhnya telah dikumandangkan oleh Vivekananda sebagaimana kutipan di depan bahwa cara berpikir sektarian dalam konsep negara dengan multiagama merupakan hal yang sangat tidak pantas. Setiap agama harus bias menghimpun berbagai semangat dan memelihara

kepribadiannya dan tumbuh sesuai dengan hukum pertumbuhan (Vivekananda dalam Bagus, 1995:75). Dari konsep inilah sesungguhnya lahir teologi pembebasan, karena menganggap semua manusia di muka bumi ini adalah merupakan bagian dari dirinya sendiri, seperti di Amerika Latin muncul pemimpin dengan label teologi pembebasan (*liberation theology*) untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalis, Swami Agniwesh yang telah melakukan kegiatan kemanusiaan yaitu menanggulangi anak-anak korban narkoba dan di Indonesia muncul organisasi Islam Muhammadiyah yang mampu mengubah masyarakat desa yang dahulunya merupakan sarang pencuri dan pembunuh menjadi orang yang saleh sesuai dengan konsep agama Islam (Bagus, 2001:19).

Agama Hindu dalam hubungannya dengan negara sesungguhnya tersirat dengan adanya konsep dharma negara dan *guru wisesa*. Dharma negara adalah konsep hubungan umat Hindu sebagai kopmponen bangsa, memiliki kewajiban dan hak dalam negara RI ini. Namun persoalannya perlu penjabaran lebih lanjut terhadap konsep ini yang menyangkut hubungan yang seperti apa, bagaimana posisi umat Hindu dalam politik negara, bagaimana sikap umat Hindu dalam memandang negara dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan segera muncul. Yang tidak kalah pentingnya adalah penafsiran *guru wisesa*, apakah yang dimaksud adalah tunduk terhadap pemerintah atau negara. Untuk sebuah konsep tentu masih perlu dijabarkan sehingga umat Hindu menganggap wajib menghormati pemerintah, meskipun pemerintah itu korup. Menerima secara pasrah saja suatu sistem yang tidak adil berarti bekerja sama dengan sistem itu, dengan demikian kaum yang tertindas sama jahatnya dengan si penindas. Menolak bekerja sama dengan si jahat merupakan kewajiban moral seperti halnya bekerja sama dengan yang baik merupakan kewajiban moral juga (King, 1994:219).

Umat Hindu sesungguhnya mempunyai konsep ke arah masyarakat sipil sebagaimana di katakana oleh Gandhi *civil disobedience* tak akan membawa suatu masyarakat keadaan anarkis atau ketidakadilan. Konsep *civil disobedience* adalah hak umat Hindu untuk melakukan pengingkaran terhadap kebijaksanaan pemerintah, jika pemerintah membuat kebijaksanaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan sebagainya. *Civil disobedience* adalah hak tiap warga negara, ia tidak dapat dihapuskan jika kita hendak mempertahankan kehormatan manusia. Namun, pengingkaran itu bersifat “civil” dan beradab, ia harus senantiasa jujur, sopan, berdisiplin dan bertahan, ia tidak boleh bersifat kekerasan dan tidak boleh mengandung kebencian (Sarma, 1952:174).

Mengacu pada konsep di atas, maka muncul pertanyaan, apakah Hindu mampu mengembangkan *civil disobedience* sebagai bentuk mulai munculnya masyarakat sipil itu sendiri. Jawabnya tentu mampu asalkan ada muncul LSM-LSM Hindu, organisasi Hindu, termasuk Parisada, kaum intelektual muda Hindu, yang tidak saja memperjuangkan kualitas umat dalam hubungannya dengan spritualitas, namun juga mampu memperjuangkan hak-hak umat Hindu dari berbagai tekanan atas dominasi atau hegemoni penguasa atau negara. Kelompok-kelompok inilah yang senantiasa mengkritisi kebijakan pemerintah yang dapat memarjinalkan hak hidup, hak budaya, hak agama, hak bahasa dan sebagainya. Kelompok-kelompok inilah yang harus memberdayakan masyarakat baik tataran teologis melalui pendalaman *dharma*, *sradha* dan lain-lainnya. Maupun tataran aksi dengan konsep teologi pembebasan yakni kepedulian terhadap masalah sosial, politik, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Jika anda seorang demokrat sejati, anda mungkin mempunyai perbedaan tetapi anda akan berusaha menyesuaikannya, anda akan berusaha untuk mengatasinya dengan kesepakatan bersama.

Anda tidak akan pernah mampu mengatakan bahwa ada sebuah perbedaan dan sebuah perbedaan akan selalu membawa pada perselisihan dan perselisihan selalu bermakna kekerasan. Ini adalah bukan tipe kehidupan yang anda harus ambil (Radhakrishnan, 2000:86). Apa yang dikatakan oleh Radhakrishnan pada hakikatnya pondasi filosofis kehidupan demokrasi tanpa kekerasan atau *civil disobedience* yang merupakan bentuk resistensi umat terhadap politik NKRI. Perjuangan Hindu sesungguhnya masih panjang untuk bias mencapai akses penting yang mampu membawa ke arah eksistensi Hindu dalam Negara RI ini.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan pembangunan masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society* merupakan reaksi kritis terhadap terlalu kuatnya dominasi negara dalam menentukan berbagai aspek kehidupan warga negara (rakyat). Wacana ini sebagai wadah pemberdayaan masyarakat agar memiliki daya resistensi terhadap hegemonik negara. Meskipun secara konsep *civil society* telah berakar kuat dalam pemikiran ilmu sosial dunia Barat, namun perkembangannya di Indonesia boleh dikatakan baru tingkat wacana pada dekade 1990-an dan tiga tahun terakhir ini wacana ini sedikit tidaknya telah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dalam saluran reformasi.

Agama Hindu sebagai komponen masyarakat, juga tidak luput dari pemikiran reformasi tersebut. Oleh karena itu Hindu harus mampu berperan serta dalam mengkritisasi kebijakan pemerintah yang menyimpang dari kaidah hukum, keadilan, kemanusiaan, sebagai bentuk kewajiban moral dalam konsep guru wisea dan dharma negara menuju masyarakat sipil di Indonesia. Fenomena saat ini sungguh menggembirakan karena telah munculnya LSM-LSM yang bernafaskan agama Hindu,

organisasi Hindu namun kita belum mengetahui visi dan misinya, apakah merupakan hanya memperjuangkan kualitas umat dalam hubungannya dengan Tuhan saja atau memiliki misi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dari segi sekulernya (kemanusiaan dan sosial, HAM), bahkan meminjam istilah Gramsci menjadi *intelektual organik* yang militan dan mengkritisi setiap gejala yang dapat memarjinalkan hak-hak hidup warga masyarakat. Agama Hindu akan mampu menuju terbentuknya masyarakat sipil, jika tumbuhnya kelompok-kelompok seperti diatas, yang mandiri, sukarela, tidak berafiliasi pada kekuasaan, tidak terkooptasi oleh penguasa/negara, tetapi justru merupakan kekuatan yang mampu mengimbangi dominasi atau hegemonik negara dalam menentukan segala aspek kehidupan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Bachtiar, 1999. "Civil Society dan Wacana Kebudayaan" Dalam Kompas Hari Selasa Tanggal 1 Juni.
- Andrain, Charles F, 1992. *Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial*. Penerjemah Luqman Hakim. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 1995 (Penyunting). *Beberapa Permasalahan Sosial Dalam perspektif Hindu Dharma. Pidato Swami Vivekananda pada Sidang Parlemen Agama-agama di Chicago*. Denpasar: Upada Sastra
- _____, 1998. "Menggugat Nasionalisme Indonesia : Antara Jepitan Kaum Separatis, Federal Dan Loyalitas". Makalah seminar Denpasar Universitas Udayana.
- _____, 2001. "Menuju Parisadha Yang Melayani Umat". Makalah pada Seminar Nasional Menyongsong Mahasabha VIII Parisadha Hindu Dharma Indonesia. Denpasar.
- Capra, Fritjof, 1997. *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat Dan Kebangkitan Kebudayaan*. Penerjemah M. Thoyibi. Yogyakarta : Benteng Budaya.
- Craig, Chalhoun, 1999. Nasionalisme dan Civil Society : Demokrasi, Keanekaragaman Dan Penentuan Nasib Sendiri" dalam wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Volume 1, Edisi I Yogyakarta : INSIST.
- Culla, Adi Suryadi, 1999. Masyarakat Madani, Pemikiran Teori Dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus, 1999. Membangun Masyarakat Madani : Tinjauan Birokratik-Politik" Dalam Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium ke -3. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (ed). Yogyakarta : Aditya Media.
- Fakih, Mansour, 1999. Masyarakat Sipil; Catatan Pembuka". Dalam Wacana Jurnal Ilmu Social Transformatif, Volume 1 Edisi 1. Yogyakarta : INSIST.
- Gellner, Ernest, 1995. *Membangun Masyarakat Sipil*. Bandung : Mizan.
- Hadiwinata, Bob. S, 1999. "Masyarakat Sipil Indonesia : Sejarah Kelangsungan dan Trasformasinya" Dalam Wacana Jurnal Ilmu Social Transformatif. Volume 1, edisi 1. Yogyakarta : INSIST.
- Hafner, Robert W. 1999. *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Penerjemah Ahmad Baso. Jakarta : ISAI
- Hikam, Muhammad AS, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LPBES.
- _____, 1999. Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia. Jakarta : Erlangga.
- King, Luther Martin Jr. 1994 "Langkah Menuju Kebebasan" Dalam *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2000. *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia*,

- Suatu Problematic Filsafat Kebudayaan. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Lengenberg, Michael Van. 1990. *The New Order State : Language, Ideology, Hegominy*". Dalam Arif Budiman (ed) *State and civil society in Indonesia*. Center of southeast asian studies : Monash University.
- Lockce, John. 1994. *Traktat kedua mengenai pemerintahan sipil*" dalam demokrasi klasik dan modern. Mochtar Lubis penyunting. Terjemahan Hermoyo. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nasikun. 1995. *Sistem Social Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Qodir, Zuly, 1999 " Prasyarat Budaya Civil Society Dalam Opini Masyarakat – Dari Krisis Ke Reformasi. Masyarakat versus negara paradigma baru membatasi dominasi negara. Jakarta : Harian Kompas.
- Radhakrishnan, S. 2000. *Pencarian kebenaran*. Penerjemah tri budhi sastrio. Yogyakarta : Forum Penyadaran Dharma bekerjasama dengan duta wacana University press.
- Rahardjo, Dawam M. 1999. *Gerakan Keagamaan Dan Penguatan Civil Society Kata Pengantar Dalam Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society*. Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (penyunting). Jakarta : LSAF.
- Sairin, Sjafrin. 1999. "Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya" dalam membangun masyarakat madani menuju Indonesia baru milenium ke-3 : program pascasarjana Univ. Muhamadiyah Malang (ed). Yogyakarta : Aditya Media.
- Sarma, D.S. 1952. *Gandhi Sutra*. Terjemahan Soejono. Jakarta: Yayasan Pembangunan Jakarta.
- Setiawan, Bonnie, 1996. *Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Dalam Prisma Majalah*
- Siagian, Fasial. 1995. "Meretas Kepemimpinan Yang Demokratis Dalam Penerapan Otonomi Daerah Di Indonesia Suatu Perspektif Dari Hubungan Negara Dan Masyarakat". Dalam analisis CSIS. Tahun XXIV No. 2 Maret-april.
- Sumartana. 1999 "Posisi Kaum Agamawan Dalam Agenda Pemberdayaan Masyarakat Madani. Dalam membangun masyarakat madani, menuju Indonesia baru millennium ke 3 penyunting Taufik Abdullah, dkk. Yogyakarta : Aditya Media.
- Zoetmulder, PJ. 1982. *Old Javanese – English Dictionary I dan II*. Koninkljk Institut Vor Taal- Land En Volkenkunde. Gravenhage Martinus Nijhoff.